

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah berupa sumber daya alam nabati maupun sumber daya alam mineral yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Indonesia juga merupakan salah satu negara berkembang yang menjadikan sektor pertanian sebagai mata pencaharian dari mayoritas penduduknya. Dengan demikian sebagian penduduk Indonesia bergantung pada sektor pertanian, dimana sektor tersebut dapat meningkatkan taraf hidup perekonomian di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Pangan No. 7 Tahun 1996 bahwa pangan didefinisikan sebagai “Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, atau pembuatan makanan atau minuman”. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pemerintah dan masyarakat bisa bertanggung jawab dalam mewujudkan ketahanan pangan. Dengan demikian, pemerintah wajib menyelenggarakan peraturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup dengan jumlah gizi yang baik.

Pembangunan sektor pertanian bukan hanya sebatas bagaimana memproduksi produk pertanian dalam menyediakan stok pangan nasional, tetapi memiliki peran

yang cukup besar kontribusinya terhadap PDB (Produk Domestik Bruto), penyediaan lapangan pekerjaan, sumber pendapatan, dan perekonomian nasional maupun regional, serta penyediaan bahan baku bagi industri olahan yang berbasis tanaman pangan. Salah satu pangan yang menjadi bahan pokok utama dan strategis di dunia adalah beras, baik di negara berkembang maupun di negara maju. Beras dikonsumsi oleh setengah dari tujuh miliar penduduk di dunia, lebih dari 90 persennya dikonsumsi oleh penduduk di Asia serta lebih dari 22 persennya dikonsumsi oleh penduduk di Asia Tenggara (Samarendu Mohanthy, 2013).

Beras merupakan makanan pokok yang dikonsumsi dominan oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015, beras adalah jenis kebutuhan pokok hasil pertanian. Beras diklarifikasikan oleh pemerintah sebagai kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, maka pemerintah mempunyai kewajiban menjaga pasokan dan stabilitas harga beras (Rohman & Maharani, 2018).

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai produksi dan konsumsi beras tinggi di dunia. Indonesia adalah negara dengan produksi beras tertinggi nomor 3 di dunia setelah Cina dan India dengan kontribusi beras sebesar 8,5% atau setara kurang lebih 54 juta ton (Rahayu & Febriaty, 2019). Salah satu faktor yang mempengaruhi impor beras di Indonesia adalah produksi beras dalam negeri. Tingkat produksi beras yang dimiliki Indonesia lebih besar dari tingkat konsumsi, hal ini menunjukkan bahwa produksi beras dapat memenuhi konsumsi beras di Indonesia. Namun yang terjadi di kehidupan nyata, pemerintah masih melakukan impor beras dari luar negeri selama dua puluh tahun terakhir. Hal ini

bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 36 Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yaitu: “Impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri”.

Bagi sebagian masyarakat, beras merupakan komponen sentral dalam budaya sejumlah komunitas. Di sisi lain, lebih dari 200 juta petani memproduksi padi dengan skala usaha kurang dari satu hektar dan budidayanya menjadi aktivitas ekonomi utama yang melibatkan banyak kelompok masyarakat yang miskin. Beras juga berperan sebagai “standar” upah pekerja pada sektor pertanian tanaman pangan atau non pertanian. Dalam peran keduanya seringkali memunculkan konflik dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah, apakah akan mengintervensi dengan melindungi petani ketika harga turun atau melindungi konsumen ketika harga naik. Penentuan harga dapat mempengaruhi kemampuan produksi beras, karena dengan semakin besarnya produksi beras maka dapat diasumsikan harga beras yang dijual kepada konsumen di pasar akan semakin murah dikarenakan ketersediaan beras di pasar melimpah, sedangkan jika semakin kecil beras maka dapat diasumsikan harga beras yang dijual kepada konsumen di pasar akan semakin mahal dikarenakan ketersediaan beras di pasar terbatas.

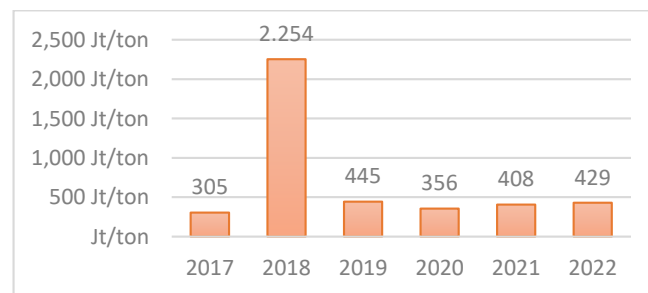
Beras merupakan salah satu produk pertanian yang mengalami banyak masalah dalam hal penyediaan stok untuk kebutuhan nasional. Oleh sebab itu, pemerintah harus memberikan perhatian penuh agar tidak menyebabkan krisis pangan di Indonesia. Dalam kebutuhan pangan, sektor pertanian digunakan untuk memproduksi beras yang berupa makanan pokok warga negara Indonesia. Semakin

meningkatnya jumlah penduduk maka akan semakin meningkatnya permintaan pangan akan beras dan upaya peningkatan produktivitas dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan beras dalam negeri. Kebijakan menjaga stok beras yang cukup berkontribusi besar untuk menjaga ketahanan pangan, salah satunya dapat dilakukan melalui perdagangan.

Perdagangan internasional dapat diartikan sebagai aktivitas dagang yang dilakukan oleh dua negara atau lebih atas dasar kesepakatan bersama. Tujuan dari adanya perdagangan internasional adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang belum tercukupi dan meningkatkan devisa negara. Dengan ditetapkannya tujuan tersebut, maka dapat diketahui faktor penyebab terjadinya perdagangan internasional yaitu perbedaan sumber daya alam yang dimiliki suatu negara, menjalin kerja sama antar negara, dan memperluas pasar perdagangan. Untuk memperoleh hal tersebut maka diperlukannya kegiatan ekspor dan impor barang dari luar negeri.

Menurut Ali Purwito dan Indriani (2015: 10), impor diartikan memasukkan barang, jasa, atau modal yang berasal dari luar pabean ke dalam pabean, dengan tujuan untuk dipakai, dimiliki, dialihkan, dan dijual dengan mendapatkan manfaat atau keuntungan atas barang, jasa, atau modal yang dimaksud. Kegiatan ekspor impor berguna untuk meningkatkan perekonomian suatu negara dan meningkatkan hubungan luar negeri antara kedua negara yang melakukan kegiatan ekspor impor tersebut. Indonesia melakukan kegiatan ekspor impor untuk memenuhi kebutuhan akan pangan dalam negerinya agar tercipta stabilitas pasokan dan harga pangan dalam negeri. Impor merupakan cerminan kedaulatan ekonomi suatu negara,

apakah barang dan jasa buatan dalam negeri masih menjadi tuan di negeri sendiri. Suatu negara melakukan impor karena mengalami defisiensi (kekurangan/kegagalan) dalam menyelenggarakan produksi barang dan jasa bagi kebutuhan konsumsi penduduknya (Husna, 2010).

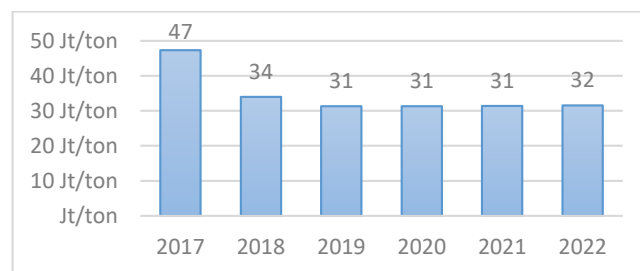


Gambar 1.1
Impor Beras Indonesia Tahun 2017-2022 (Juta/Ton)
 Sumber: Basis Data Perdagangan PBB Tahunan (UN COMTRADE).

Indonesia dalam menjaga keamanan pasokan beras terus mengimpor beras setiap tahunnya. Jumlah impor di Indonesia keseluruhan terus mengalami fluktuasi. Berdasarkan gambar 1.1 diatas, data impor beras dari tahun 2017-2018 mengalami peningkatan dengan angka tertinggi sebesar 2.254 juta/ton impor beras di tahun 2018. Kemudian impor beras mengalami penurunan di tahun 2019-2020 yaitu sebesar 356 juta/ton, dan mengalami kenaikan impor beras lagi di tahun 2021-2022 yaitu sebesar 429 juta/ton. Penentuan volume impor beras harus diatur, karena jika tidak maka akan terjadi surplus beras yang mengakibatkan turunnya harga beras yang beredar di pasaran. Pengaturan volume impor beras juga berpengaruh kepada penggunaan anggaran belanja devisa negara agar lebih teralokasikan dengan baik dan tepat. Pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat disinyalir dapat

mengganggu ketahanan pangan di Indonesia, sehingga diperlukannya kebijakan impor untuk menambah stok beras serta menstabilkan harga beras nasional.

Menurut Atmadji dalam Yulianti (2012) alasan suatu negara melakukan impor disebabkan adanya kegagalan negara tersebut dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri, baik dalam bentuk kualitas maupun kuantitas. Ketidakmampuan suatu negara dalam menyediakan kebutuhan beras terjadi akibat negara tersebut tidak dapat memproduksi secara efisien. Jumlah impor meningkat bukan berarti dapat mencukupi kebutuhan beras di dalam negeri, sebab jumlah penduduk Indonesia tiap tahun meningkat sehingga peningkatan jumlah impor beras dimaksudkan untuk mengimbangi peningkatan jumlah penduduk yang mengkonsumsi beras.



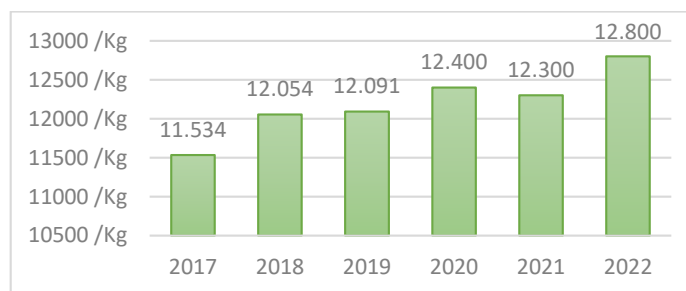
Gambar 1.2
Produksi Beras di Indonesia Tahun 2017-2022 (Juta/Ton)
Sumber: Produksi Padi dan Beras Menurut Provinsi (2018).
Website Badan Pusat Statistik (BPS).

Salah satu faktor yang mempengaruhi impor beras di Indonesia adalah produksi beras dalam negeri. Berdasarkan gambar 1.2 diatas, produksi beras tertinggi di Indonesia berada pada tahun 2017 yaitu sebesar 47 juta/ton. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang banyak memproduksi beras di dunia, namun Indonesia masih tetap menjadi negara importir beras. Situasi ini disebabkan karena

para petani masih menggunakan teknik-teknik pertaniannya yang tidak optimal ditambah dengan jumlah penduduk yang besar pula.

Pemerintah kerap menggantungkan kegiatan impor beras dengan alasan sebagai kebutuhan untuk menambah cadangan beras di dalam negeri dan memperolehnya dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga beras dalam negeri. Namun strategi pemerintah yang seperti ini dapat berdampak negatif terhadap petani di Indonesia karena akan menurunkan kesejahteraan petani dalam negeri, sehingga harga jual beras akan menurun atau menjadi lebih murah. Para petani Indonesia seharusnya mendapatkan keuntungan karena tingginya produksi beras, tetapi justru mengalami kerugian yang diakibatkan pemerintah yang kurang kompeten untuk mengatasi masalah kebijakan impor beras dari luar negeri.

Selain sebagai cadangan dalam negeri, yang membuat pemerintah melakukan impor beras adalah terjadinya defisit beras di beberapa provinsi yang disebabkan karena penyaluran pasokan beras yang terhambat sehingga mengakibatkan tingginya konsumsi beras di beberapa daerah. Adapun hambatan lainnya yaitu luasan panen sawah yang menurun dikarenakan perubahan iklim yang memicu berkurangnya lahan pertanian yang diperkirakan akan menyebabkan kemerosotan hasil panen. Hal ini menjadi alasan pemerintah melakukan impor beras demi menjaga ketersediaan beras dalam negeri (Naufal, 2019).



Gambar 1.3

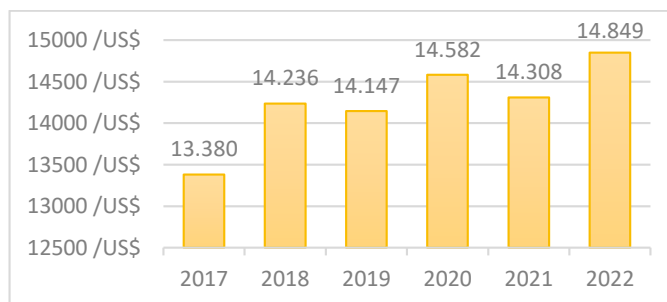
Harga Beras di Indonesia Tahun 2017-2022 (Rupiah/Kg)

Sumber: Rata-rata Harga Beras di Tingkat Perdagangan Besar (Grosir).
Website Badan Pusat Statistik (BPS).

Besarnya impor yang dilakukan pemerintah tidak terlepas dari besarnya kebutuhan beras di Indonesia dan juga dipengaruhi oleh harga beras dalam negeri yang dianggap terlalu mahal apabila dibandingkan dengan harga beras dunia. Salah satu penyebab mahalnya harga beras adalah menurunnya pertumbuhan produksi padi (Husna, 2010: 4). Menurut Khotimah (2017) menyebutkan bahwa dalam masalah tersebut pemerintah seharusnya lebih meningkatkan kesejahteraan para petani, dimana sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Sektor pertanian merupakan sumber pertumbuhan output nasional yang lebih memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDB dari keseluruhan sektor perekonomian Indonesia.

Beras merupakan salah satu komoditi yang memiliki masalah yang cukup menarik dalam hal pemasarannya, dimana dalam waktu singkat, komoditas ini dapat mengalami kenaikan harga beras yang akan mempengaruhi konsumsi rumah tangga. Sebaliknya, penurunan harga gabah dan beras ternyata menimbulkan dilema bagi pemerintah, karena kenaikan harga pupuk telah meningkatkan biaya produksi di tingkat petani. Maka hal ini menyebabkan stabilitas harga beras di pasar

domestik sangat diperlukan untuk mencegah fluktuasi harga, baik yang dilakukan melalui mekanisme pasar maupun melalui investasi pasar secara langsung ataupun tidak langsung.

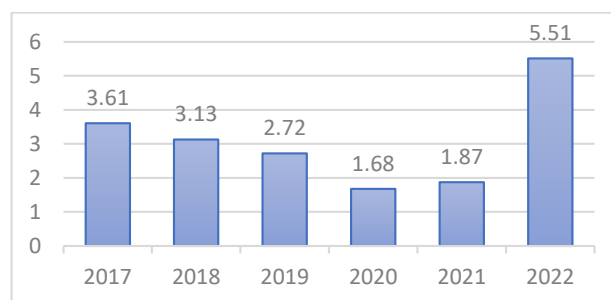


Gambar 1.4
Nilai Tukar Tahun 2017-2022 (Rupiah/US\$)
 Sumber: Data Nilai Tukar Rupiah terhadap US\$.
 Website World Bank.

Pada gambar 1.4 diatas, menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah atas valas bervariasi. Salah satu acuan mata uang rupiah valas adalah dollar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika setiap tahunnya cenderung mengalami kenaikan. Nilai tukar tertinggi berada pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp14.849/US\$, sedangkan nilai tukar terendah berada di tahun 2017 sebesar Rp13.380/US\$. Penyebab naik turunnya dollar adalah tingginya permintaan, dalam hal ini para investor akan lebih tertarik menanamkan kekayaannya ke dalam bentuk dollar Amerika Serikat. Hal inilah yang menyebabkan dollar Amerika Serikat terus mengalami penguatan atau apresiasi yang sebaliknya malah menyebabkan rupiah mengalami pelemahan atau depresiasi.

Menurut Mankiw (2013) menyebutkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi impor termasuk harga barang dalam negeri dan luar negeri, serta

nilai tukar. Nilai tukar/kurs merupakan salah satu penentu kuat tidaknya mata uang suatu negara yang mencerminkan perekonomian negara tersebut stabil atau tidak. Nilai tukar muncul karena masing-masing negara mempunyai mata uangnya sendiri, sehingga diperlukan mata uang yang secara global digunakan sebagai alat pembayaran internasional. Kurs valuta asing akan berubah-ubah (Nizar & Abbas, 2019). Apabila kurs valuta asing mengalami kenaikan terhadap mata uang dalam negeri, maka hal ini dapat mengakibatkan terjadinya penurunan impor dan begitu pula sebaliknya, jika kurs valuta asing mengalami penurunan terhadap mata uang dalam negeri, maka hal ini dapat meningkatkan impor (De & Peersman, 2012).



Gambar 1.5
Inflasi Tahun 2017-2022 (Persen)
Sumber: Data Inflasi Umum Tahunan (Persen).
Website Badan Pusat Statistik (BPS).

Berdasarkan gambar 1.5 diatas, data inflasi tertinggi berada pada tahun 2022 yaitu sebesar 5.51%, sedangkan data inflasi terendah berada di tahun 2020 yaitu sebesar 1.68%. Kenaikan inflasi ini disebabkan karena terjadinya permasalahan tekanan harga global, gangguan *supply* pangan, dan kebijakan penyesuaian BBM (Badan Kebijakan Fiskal, 2023). Penyebab terjadinya kenaikan inflasi di sisi permasalahan *supply* pangan, karena harga pangan menjadi naik diakibatkan oleh terbatasnya stok komoditas pangan di banyak daerah. Selain itu, kenaikan tarif

angkutan akibat kenaikan harga BBM juga turut andil dalam melonjaknya inflasi pangan.

Inflasi menyebabkan harga barang impor menjadi lebih murah dari pada barang yang dihasilkan dalam negeri, maka pada umumnya inflasi akan menyebabkan impor beras berkembang lebih cepat. Inflasi adalah gejala ekonomi yang menunjukkan naiknya tingkat harga secara umum yang berkesinambungan. Syarat Inflasi yaitu terjadi kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus. Jika hanya satu atau dua jenis barang saja yang naik, itu bukan merupakan inflasi (Hasyim, 2016).

Berdasarkan pemaparan masalah-masalah diatas, dengan adanya kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah setiap tahun walaupun sudah diketahui bahwa angka produksi beras di Indonesia cukup tinggi, namun masih terdapat penyaluran pasokan beras yang terhambat sehingga mengakibatkan tingginya konsumsi beras di beberapa daerah, maka terdapat faktor lain yang mempengaruhi impor beras di Indonesia. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2021) harga beras dalam negeri berpengaruh terhadap impor beras, sedangkan menurut Aridhana (2020) nilai tukar/kurs juga dapat mempengaruhi impor beras. Faktor lain yang menjadi permasalahan impor beras di Indonesia yaitu inflasi, dimana tingkat inflasi dapat mempengaruhi harga barang impor. Hal ini berarti inflasi berkencenderungan menambah impor (Sukirno, 2012: 402). Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah ini dengan judul penelitian **“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Impor Beras di Indonesia Tahun 2005-2022”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas mengenai produksi beras, harga beras, nilai tukar, dan inflasi yang dapat mempengaruhi impor beras di Indonesia tahun 2005-2022, maka dapat dirumuskan permasalahan yang dapat dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh produksi beras, harga beras, nilai tukar, dan inflasi secara parsial terhadap impor beras di Indonesia tahun 2005-2022?
2. Bagaimana pengaruh produksi beras, harga beras, nilai tukar, dan inflasi secara bersama-sama terhadap impor beras di Indonesia tahun 2005-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yang dirumuskan berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh produksi beras, harga beras, nilai tukar, dan inflasi secara parsial terhadap impor beras di Indonesia tahun 2005-2022.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh produksi beras, harga beras, nilai tukar, dan inflasi secara bersama-sama terhadap impor beras di Indonesia tahun 2005-2022.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi yang diharapkan menjadi bahan bacaan dan masukan serta menambah wawasan untuk kepentingan

edukasi penelitian selanjutnya mengenai pengaruh produksi beras, harga beras, nilai tukar, dan inflasi terhadap impor beras di Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi beberapa pihak, diantaranya yaitu:

1. Bagi pengambil keputusan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk pembuatan kebijakan, peraturan, serta implementasi kegiatan selanjutnya terkhusus dalam ruang lingkup kegiatan impor beras di Indonesia.
2. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti lain untuk meneliti kembali mengenai impor beras di Indonesia.
3. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta salah satu sarana penerapan ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Indonesia pada tahun 2005-2022 yang bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS), UN COMTRADE, World Bank, dan sumber lainnya yang mendukung dalam penelitian ini.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Untuk memperoleh dan mengolah data/informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, penulis melaksanakan penelitian sekitar kurang lebih selama 11 bulan di mulai dari bulan September 2023 sampai dengan bulan Juli 2024.

Tabel 1.1

Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2023-2024										
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1	Penyerahan SK bimbingan											
2	Penyerahan SK bimbingan kepada pembimbing I dan II											
3	Konsultasi awal dan menyusun rencana kegiatan											
4	Proses bimbingan untuk menyelesaikan proposal											
5	Seminar proposal usulan penelitian											
6	Pengolahan data											
7	Penyusunan skripsi dan bimbingan											
8	Ujian skripsi											